

DISKURSUS POSITIVISME DAN KEMUNGKINAN ADOPTI METODOLOGI DALAM RANAH ILMU-ILMU SOSIAL

Oleh:

Marianus Ola Kenoba¹⁾, Katarina Dhiki²⁾

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende

¹marianuskenoba64@gmail.com

²dhikikatarina0@gmail.com

Abstrak

Pengalaman tercerabutnya manusia dari akar sosio historisnya merupakan efek logis atas pemanfaatan epistemologi positivisme yang cenderung berwatak totaliter. Karakter totaliter di dalam logika positivisme, justru semakin memarjinalkan peran ilmu-ilmu sosial secara kontekstual. Akibatnya, ilmu-ilmu sosial terseret masuk ke dalam krisis pengetahuan yang serius. Jejak krisis ini, sebetulnya sudah dapat teridentifikasi melalui landasan epistemologis maupun landasan metodologisnya. Keterbatasan perangkat metodologis-epistemologis itu-lah yang telah menyebabkan absennya telaah mengenai pengalaman historis-biografis individual. Artikel ini bertujuan untuk menajaki kemungkinan adopsi metodologi di dalam rumpun ilmu sosial yang mampu menjangkau pengalaman riil manusia dalam konteks historisitasnya. Sementara itu, metode yang digunakan di dalam artikel konseptual ini adalah model penelitian kepustakaan. Hasil riset tekstual ini memperlihatkan bahwa penerapan epistemologi positivisme di dalam ilmu-ilmu sosial telah melahirkan dilema alienasi terhadap manusia. Atas dasar itu-lah, ilmu-ilmu sosial positifis perlu menajaki metode etnografi mikroskopis dalam bidang ilmu antropologi dan metode biografi imajinatif dalam bidang ilmu sastra. Spirit interdisipliner dan dekolonisasi di dalam aspek metodologis ini, memungkinkan ilmu-ilmu sosial untuk menata kembali narasi sosial secara imajinatif dan semakin mematahkan pijakan epistemologis maupun metodologisnya.

Kata kunci: Positivisme, epistemologi, metodologi ilmu-ilmu sosial, etnografi mikroskopis, biografi imajinatif

1. PENDAHULUAN

Lahirnya zaman fajar budi atau *aufklarung* di Eropa, berimplikasi sangat luas bagi arah perkembangan ilmu pengetahuan moderen. Konsekuensi logis yang muncul ke permukaan mirip-mirip seperti bertumbuhnya cendawan di musim hujan. Praktisnya, dapat diterangkan bahwa sejak zaman fajar budi atau era pencerahan itu dimaklumkan, bersamaan itu pula lahir beragam variantaksonomi keilmuan. Gejolak dunia ilmu pengetahuan yang analog dengan kemunculan cendawan itu berada di dalam lingkup ilmu-ilmu alam, maupun ilmu-ilmu sosial-humaniora. Variasi-varian keilmuan tersebut tampil “percaya diri” dengan kekuatan seperangkat eksemplar teori maupun instrumen metodologisnya masing-masing.

Pada tataran epistemologis-metodologis, positivisme sebagai “anak kandung” dari spirit zaman pencerahan berkembang se-demikian pesatnya. Perkembangan yang pesat ini berbanding lurus dengan capaian-capaian prestasi gemilangnya. Prestasi gemilang tersebut telah menempatkan positivisme sebagai kekuatan intelektual yang paling dominan dan kemudian berubah menjadi rezim pengetahuan. Menjadi wajar apabila *claim* obyektivitas di dalam positivisme dapat berfungsi sebagai instrumen yang paling efisien untuk melegitimasi dan memuatkan kebenaran rezim pengetahuan ini (Kleden 2018).

Secara mikro dapat diterangkan bahwa pada aras ilmu-ilmu alam, *claim* obyektivitas tidak selalu problematis baik dari sisi epistemologisnya, maupun dari dimensi praksis metodologisnya. Namun, persoalannya menjadi sangat kompleks ketika *claim* obyektivitas ini secara “*pure*” diterapkan di dalam domain ilmu-ilmu sosial-humaniora. Dampak yang paling mencolok dari penerapan secara rigid *claim* obyektivitas yakni “mandulnya” peran ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan dalam mengantisipasi dan meramalkan kemungkinan obyektif atas fakta de-humanisasi yang dialami oleh manusia.

Misalnya, pemanfaatan teknologi tinggi (*high tech*), belum optimal memberi solusi bagi problematika eksistensial yang dihadapi oleh manusia. Sebaliknya, kecenderungan yang dirasakan bahwa hadirnya teknologi justru memunculkan tragedi kemanusiaan yang sangat pelik. Perkembangan teknologi pada titik yang paling ekstrim menjadi lepas kendali sehingga hampir tidak ada satu kekuatan-pun yang mampu mengendalikan sistem teknologisasi. Dengan demikian, sistem teknokrasi bergerak dengan logikanya sendiri. Jadi, manusia yang semula menikmati kemudahan-kemudahan oleh teknologi kemudian pada gilirannya hanya menjadi *second order* di dalam keseluruhan sistem teknologi. Lebih buruk lagi, manusia-manusia riil mengalami dilema psiko-sosiologis yang oleh filsuf humanis Karl Marx menyebutnya dengan konsep *alienasi* atau keterasingan. Bertolak dari problem sosio-kultural yang diakibatkan oleh purifikasi atas

epistemologi positivisme sebagaimana yang telah dijelaskan secara “kikir” di atas, maka artikel konseptual ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan adopsi pijakan epistemologi-metodologis yang paling khas bagi studi ilmu-ilmu sosial humaniora.

2. METODE PENELITIAN

Riset tekstual ini memanfaatkan model penelitian kepustakaan atau *library research*. Menurut Sukadi, (2012:38) isi dari riset kepustakaan bisa berbentuk telaah teoritis yang konteks pembahasannya terarah pada informasi seputar problem riset yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Adapun kategori-kategori sumber literatur yakni: jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, surat-surat resmi, manuskrip, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Zed, (2008:17) ada empat tahap dalam riset kepustakaan yang perlu dijalani oleh peneliti yakni (1) mempersiapkan sarana perlengkapan pelaksanaan (2) menyediakan *working bibliography*, (3) mengelola waktu untuk membaca seluruh literatur dan (4) aktivitas membaca dan mencatat secara cermat dimensi materi penelitian. Bertolak dari pemahaman ini, maka referensi-referensi tertulis menyangkut epistemologi positivisme, metode etnografi mikroskopis, dan metode ilmu susastera merupakan materi dasar di dalam telaah kepustakaan ini. Referensi tersebut, dijajaki terlebih dahulu, dikumpulkan, dan disusun secara tematis. Langkah selanjutnya adalah memilah secara ketat, materi tekstual yang betul-betul relevan dengan topik yang diajukan di dalam artikel ini. Materi tekstual yang relevan itulah yang kemudian dibaca secara kritis dan dimanfaatkan sebagai referensi pembanding utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme dan Filsafat Positivisme: “Petaka” Logosentris

Sejak berpisah dari induk ilmu pengetahuan atau *mother of science* (filsafat), masing-masing ilmu mencari landasan epistemologisnya sendiri. Kondisi ini memungkinkan kebebasan ruang bagi *science* untuk berkembang secara massif. Namun, dilema-dilema eksistensial kemanusiaan segera muncul sebagai akibat dari penerapan logika *science* di dalam hampir keseluruhan aspek hidup manusia. Selain itu, dampak lainnya adalah munculnya berbagai ideologi yang turut “memboncengi” penerapan logika *science*. Salah satu ideologi yang terbungkus rapih di dalam kemasan logika *science* yakni kapitalisme. Padahal, dalam wataknya yang sangat ekstrim, logika kapitalisme tidak pernah mempedulikan penderitaan yang dialami oleh manusia. Ketidakpedulian atas tragedi kemanusiaan ini disebabkan oleh orientasi yang dikejar oleh ideologi kapitalisme itu sendiri yakni *circuit of capital* atau perputaran modal secara cepat yang kemudian membentuk lingkaran setan (Priyono, 2002).

Kritik atas ideologi kapitalisme telah diajukan oleh Karl Marx sebagai salah seorang pemikir di dalam lingkup ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan. Menurut Marx (ortodoks), ideologi kapitalisme membuka ruang yang lebar bagi terciptanya kategori kelas sosial. Celakanya, kelas-kelas sosial tersebut memiliki orientasinya sendiri-sendiri sehingga menciptakan relasi antar kelas yang cenderung ke arah eksploitasi. Adapun, kelas sosial yang dimaksud yakni kelas pemilik modal yang hanya terdiri dari segelintir orang dan kemudian terdapat kelas pekerja yang populasinya terbesar. Kelas pekerja ini, hanya memiliki modal tenaganya yang berfaedah untuk menyokong aktivitas sistem kapitalisme (Suseno, 1999).

Pola relasi kelas yang kurang proporsional ini (karena berbeda orientasi antar kelas) kemudian melahirkan persoalan krusial yang disebut oleh Marx? sebagai *Phantom objectivity* atau obyektivikasi terhadap manusia. Artinya, manusia adalah sarana obyektif di dalam keseluruhan proses produksi. Meskipun demikian, Marx kemudian dikritik oleh Lukacs yang mengajukan argumentasinya bahwa Marx hanya memahami relasi manusia dalam kategori hubungan ekonomi atau determinisme ekonomi. Lebih jauh lagi, Marx lebih memfokuskan kajiannya pada obyektivikasi manusia dalam lingkaran kapitalisme dan mengabaikan wilayah historisitas subyek yang harusnya otonom terhadap dirinya sendiri.

Selain ideologi kapitalisme yang secara hegemoni mengobyektivikasi manusia, pola yang sama-pun dapat ditemui di dalam epistemologi-metodologi positivisme. Meskipun posisinya paling mapan sejak awal perkembangan ilmu-ilmu sosial, namun bukan berarti bahwa positivisme menjadi sebuah metode yang bebas dari tendensi nilai (*free-value*). Jadi, positivisme sebagai sebuah landasan epistemologis-metodologis dalam ilmu-ilmu sosio-budaya sudah cukup lama menuai polemik. Asumsi dasarnya bahwa di dalam dimensi praksis penelitian, kedudukan paradigma positivisme menjadi problematis.

Filsuf dan sosiolog Auguste Comte perintis filsafat positivisme menegaskan pokok gagasannya bahwa kajian ilmiah mengenai evolusi pengetahuan manusia berasal dari sebuah hukum alam yang bersifat mutlak (Comte, 1971:18). Jadi, memang sejak awal cita-cita filsafat positivisme adalah pemutlakan teori atas pengalaman konkret yang dihadapi oleh manusia. Bahkan untuk memperkokoh argumentasinya, Comte berupaya memperlihatkan bukti-bukti historis yang cukup meyakinkan. Bukti historis ini dapat “terlacak” di dalam gagasannya mengenai *The law of three stages* atau hukum tiga tahap perkembangan pemikiran manusia. Vase perkembangan pikiran manusia ini diandaikan oleh Comte berlaku secara universal dan bergerak secara linear (Azis, 2003:257).

Hukum tiga tahap perkembangan pikiran manusia tersebut yakni *Pertama* tahap teologis. Pada vase teologis ini, diterangkan bahwa dunia pikiran manusia masih didominasi oleh kekuatan pengetahuan absolut-*causa prima*. Bahkan, ada usaha sistematis untuk mengarah ke penjelasan-penjelasan atau upaya rasionalisasi atas dunia supranatural. *Kedua*: metafisik atau abstraksi. Tahap ini dideskripsikan sebagai vase transisi yang tidak lain merupakan modifikasi dari tahap teologis. Artinya, kekuatan dunia supranatural (tahap teologis) tersebut menurut Comte hanya mengalami proses abstraksi personifikasi. *Ketiga*: tahap positi-(visme) yang merupakan vase puncak dari evolusi panjang perkembangan pikiran manusia.

Ketika mencapai tahap positivisme, seluruh fenomena alam maupun fakta-fakta sosial dipostulatkan sebagai representasi dari aspek-aspek partikular yang bersumber dari sebuah fakta tunggal yang bersifat umum. Fakta tunggal tersebut, oleh Comte disebut dengan istilah *natural law* atau hukum alam. Hukum alam inilah yang menurut Comte merupakan *causa prima* dari seluruh perkembangan peradaban manusia di dalam sejarah. Selanjutnya, hukum alam yang bersifat absolut itu kemudian diradikalkan menjadi dasar pijakkan epistemologis dan metodologis bagi ilmu pengetahuan humaniora maupun rumpun ilmu-ilmu alam.

Betapapun demikian, epistemologi positivisme yang bersifat absolut itu justru bermasalah setidaknya bagi rumpun ilmu-ilmu sosial humaniora. Problematikanya terletak pada konteks validitas keilmuan. Adagiumnya positivisme bahwa sebuah ilmu pengetahuan diakui validitasnya jika dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris-(matematis?). Demikian kira-kira *credo* klasik di balik filsafat pengetahuan positivisme. Berpijak pada adagium di atas, maka ilmu-ilmu “klasik” seperti perdukunan, metafora, mitos, ritual-ritual adat, dan folklor-folklor tidak termasuk di dalam kategori ilmu pengetahuan. Diklaim sebagai bukan ilmu pengetahuan karena ilmu-ilmu “klasik” tersebut hampir tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan “rumus” logika positivisme.

Bahkan ada pra-anggapan bahwa ilmu-ilmu yang merupakan warisan dari “nenek-moyang” itu dimaknai sebagai kategori pengetahuan non-rasional (Pinem, 2020:123). Jadi, untuk memperoleh status obyektif ilmiah maka seperangkat gugus “ilmu” *pseudo sciences* itu mesti diinterpretasikan kembali. Proses re-interpretasi ini bukan-lah dilakukan secara “bebas” melainkan menggunakan rumus-rumus statistika yang telah teruji validitas dan reabilitasnya. Sebaliknya, ilmu-ilmu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sederetan “spesies” ilmu alam lainnya memperoleh status sebagai ilmu pengetahuan yang obyektif karena hampir pasti dimungkinkan pembuktiannya secara ilmiah.

Menghadapi problematika claim kebenaran dalam epistemologi ilmu-ilmu sosial sebagaimana dideskripsikan di atas, maka sebetulnya di Eropa telah terjadi perdebatan panjang mengenai metode positivisme. Menurut sejarahnya, perdebatan ini, di kalangan akademisi Jerman sangat populer dengan istilah *positivismusstreit* atau diskusi mengenai konsep positivisme. Pokok perdebatan sebetulnya terarah kepada problematika relasional antara aspek-aspek teoritis dan praksis. Menurut kelompok penganut aliran positivisme, konsep dan lebih-lebih teori harusnya bersifat “murni” dan “steril” dari kepentingan apapun (bebas nilai) (Bertens, 2002:239). Sementara itu, di sisi lain menurut *Mazhab Frankfurt School*, eksistensi sebuah teori tidak dapat berdiri sendiri melainkan memiliki keterpautan dengan praksis. Jadi, teori-teori mengenai apa-pun, tidak pernah bebas dari tendensi kepentingan nilai.

Apabila dirumuskan secara sederhana sebetulnya inti perdebatan metode positivisme itu lebih mengarah ke pertanyaan, mungkinkah memanfaatkan metode ilmu alam untuk sebuah riset ilmu-ilmu sosio-humaniora? Ada pretensi keyakinan yang cukup mengakar kuat pada ilmuwan positivis bahwa ilmu alam telah memperlihatkan beragam kesuksesan secara metodologis. Misalnya akselerasi teknologi moderen yang tengah dialami manfaat praksisnya saat ini, merupakan bukti paling konkrit atas suksesnya metode positivisme. Atas dasar itulah, kemudian secara serta-merta logika ilmu-ilmu humaniora-pun diandaikan begitu saja *idem ditto* dengan logika ilmu-ilmu alam (Kleden, 2018:186).

Perdebatan lanjutan para pakar ilmu sosial “kritis” menyatakan bahwa riset ilmu-ilmu sosio-humaniora sama sekali tidak memadai apabila didekati dengan rumus-rumus logika ilmu alam. Keberatan ini lebih dilatari oleh asumsi bahwa yang menjadi materi riset adalah manusia serta kekuatan budi dayanya dan bukannya kumpulan semut, segerombolan bebek, batu-batuan, dan terutama teknologi yang dapat dikalkulasi secara eksak-matematis. Keberatan yang diajukan oleh ilmuwan sosial di atas bertolak dari pokok argumentasi bahwa masing-masing ilmu memiliki kekhasan subyek-obyek penelitiannya sehingga tidak dimungkinkan hanya memanfaatkan sebuah metode tunggal (positivisme).

Salah satu kritik paling tajam yang diarahkan pada “ideologi” positivisme diajukan oleh penganut mazhab sosiologi kritis yang diwakili oleh filsuf Jurgen Habermas. Menurut penganut teori sosiologi kritis, penerapan logika positivisme di dalam ranah ilmu-ilmu sosio-humaniora hanya akan menciptakan sebuah ideologi pengetahuan baru yang berwatak totaliter (Hardiman, 2003:24). Jadi, dalam terminologi gagasan Habermas ditegaskan bahwa sikap teoritis selalu mengadaikan kepentingan manusiawi tertentu. Dengan demikian, pengetahuan praksis maupun

teoritis apa-pun selalu disertai dengan muatan nilai ideologis tertentu pula.

Dewasa ini, cukup terasa bahwa karya-karya akademis para ilmuwan sosial masih memperlihatkan aura perdebatan metodologis tersebut. Namun, hingga saat ini hampir tidak ada kata sepakat dalam hal pemanfaatan metode tunggal dalam sebuah riset ilmu sosial. Polemik mengenai demarkasi metodologis itu masih tetap berlangsung baik secara implisit maupun eksplisit. Betapapun demikian, sebaiknya kita tidak perlu memasuki lagi arena perdebatan metodologis ini karena hampir tidak ada manfaatnya sama sekali-selain hanya membuang-buang waktu dan menghabiskan energi pikiran. Karena nampaknya perdebatan metodologis tersebut hanya berputar pada poros lingkaran setan (*vicous circle*) semata. Lebih dari itu, hampir tidak ada pengetahuan baru apa-pun yang bisa diperoleh dari perdebatan yang telah menyebarkan tersebut.

Memang di dalam domain penelitian, secara umum ada dua kategori metodologis yang lazim digunakan untuk riset yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif (Azis, 2003:253). Metode kuantitatif pada umumnya digunakan dalam riset ilmu-ilmu alam. Tujuan metode kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis, membuktikan kebenaran hubungan logis antara dua variabel atau lebih, dan usaha tanpa henti untuk menemukan hukum-hukum keniscayaan yang bersifat umum. Jadi, untuk menemukan kebenaran obyektif tersebut maka alat ukur yang dianggap paling valid dalam metode penelitian kuantitatif adalah rumus-rumus statistik yang sangat rigid dan terukur.

Sementara itu, metode penelitian kualitatif umumnya dimanfaatkan di dalam riset-riset ilmu-ilmu sosio-humaniora. Adapun tujuan dari metode kualitatif adalah menemukan makna (*meaning*) di balik sebuah praksis sosio-kultural (Skoldberg, M. A. (2000). Bertolak dari tujuan riset tersebut, maka alat ukur yang digunakan bukan pada kalkulasi-kalkulasi statistika melainkan kekuatan logika dalam memahami dan menafsirkan makna sebuah peristiwa sosial. Atau sederhananya dalam bahasa Sosiolog Max Weber disebut dengan kekuatan logika *verstehen* (tindakan pemaknaan).

Rumusan lain mengenai demarkasi (metodo)-logi ini pernah diajukan oleh filsuf Sejarahwan Wilhelm Dilthey dengan konsepnya yang terkenal *Naturwissenschaften* (ilmu-ilmu alam) dan *Geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu roh/budaya). Rumusan Dilthey ini secara praksis-teknis memang cukup membantu. Meskipun demikian dari sudut pandang epistemologis, pokok-pokok argumentasinya belum terlalu kokoh. Karena Dilthey hanya membidik aspek tipologis-praksis penelitian. Sementara itu, pertanggungjawaban epistemologis terutama menyangkut autokritik atas "logika" positivisme di dalam domain *Geisteswissenschaften* cenderung menjadi bagian yang marginal dari pokok-pokok argumentasi Dilthey

atau bahkan terabaikan sama sekali. Meskipun demikian, metode *verstehen* yang telah dipopulerkan oleh Weber maupun metode *Geisteswissenschaften* dikembangkan lebih lanjut oleh antropolog Clifford Geertz. Pada dasarnya dalam khazanah ilmu antropologi moderen, gagasan metodis Geertz tersebut lebih populer dengan sebutan metode antropologi hermeneutis atau etnografi mikroskopis.

Etnografi Mikroskopis: Berkaca dari Ilmu Antropologi

Belakangan ini ada kecenderungan peningkatan minat terhadap studi-studi yang secara spesifik menganalisis pernak-pernik kontekstual yang bersumber dari praksis sosial budaya. Peningkatan minat atas kompleksitas sosial budaya tersebut dapat diketahui melalui tingginya penerbitan berbagai literatur yang isinya membahas tema ilmu-ilmu humaniora. Selain itu, cukup terasa bahwa di dalam karya-karya akademisi telah terjadi *trend* peningkatan minat terutama dalam membedah fakta sosio-kultural.

Fakta ketertarikan dunia akademis terhadap praksis kehidupan sosial budaya itu, mestinya diapresiasi secara positif. Meskipun demikian, cukup banyak pula karya akademis yang memfokuskan kajiannya pada wacana-wacana strategis humaniora masih cenderung bersifat simplistis. Simplifikasi atas karya akademis ini dapat terjadi karena belum dilandasi oleh tingkat pemahaman yang *clear* terutama menyangkut aspek-metodologis yang mendasari sebuah riset ilmiah.

Seluruh ilmu pengetahuan baik itu ilmu-ilmu sosio-humaniora maupun ilmu pengetahuan eksata (ilmu-ilmu alam) memerlukan pijakan metodologis tertentu demi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Persoalan metodologis menjadi diskursus yang potensial sebab (hanya) melalui "jalur" metodologislah yang memungkinkan akses atas *subject matter* sebuah ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, melalui metode ilmiah tertentu dapat menggiring seorang ilmuwan menuju pada pemahaman yang lebih holistik terhadap "logika" sebuah ilmu pengetahuan.

Sementara itu, disiplin ilmu antropologi mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perkembangan ini-pun berimplikasi pada persoalan pengembangan metode yang "*up to date*" dalam mengkaji fakta-fakta sosio-kultural. Meskipun terdapat varian-varian tertentu yang menjadi kekhasan metodologis dalam bidang ilmu antropologi, namun sebetulnya metode etnografi itu merupakan turunan atau lebih tepatnya memanfaatkan asumsi-asumsi dasar dari metode kualitatif dalam konteks ini *grounded research*.

Bertolak dari terminologi sejarah, istilah etnografi ini sebetulnya berdekatan dengan sejarah munculnya ilmu antropologi yang lebih *concern* terhadap kajian suku bangsa (ter)-asing?. Sehingga seolah-olah pilihan metodenya-pun berkelindan dengan telaah sistematis terhadap perilaku budaya

etnis atau suku bangsa tertentu yang dipandang *exotic*. Riset antropologi yang pada awalnya hanya berkisar pada studi-studi tentang suku bangsa tersebut kemudian diperluas lagi jangkauan paradigmatisnya melalui perspektif epistemologis yang relatif masih baru (Fachruliansyah,2018:102).

Memang studi-studi antropologi awal pada umumnya memanfaatkan pendekatan struktural-fungsional yang lebih cenderung memilih model pendekatan positivisme. Model pendekatan antropologi struktural ini pertamakali dipopulerkan oleh Claude Levi Strauss-seorang antropolog berkebangsaan Prancis. Levi Strauss berupaya mejajaki dan bahkan memanfaatkan kemungkinan teori bahasa (linguistik) dalam menganalisis karya-karya penelitian antropologisnya.

Sebetulnya Levi Strauss mengadopsi gagasan Roman Jakobson (ahli linguistik struktural) dan menjajaki kemungkinan teori linguistik ini untuk dibawa masuk ke dalam ranah ilmu antropologi. Atas dasar itulah, tidak terlalu berlebihan jikalau “aura” teori struktural-linguistik hampir mewarnai seluruh karya Levi Strauss. Para antropolog “post” Strauss memang memberikan apresiasi atau penghargaan yang positif terhadap karya-karya monumental Strauss. Apresiasi tersebut diberikan karena gagasan teoritik maupun karya-karya etnografis Strauss telah membawa sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu antropologi.

Kerja-kerja etnografi “ala” Strauss yang komponen dasar metodologisnya adalah ilmu linguistik itu, kemudian banyak ditinggalkan oleh para ahli dalam bidang ilmu antropologi. Para antropolog generasi baru ini, kemudian memperbaharui landasan epistemologi dalam wailayah etnografi “klasik”. Ada banyak antropolog moderen yang mencari “jalan” masing-masing untuk membedah kompleksitas hidup manusia dan kebudayaannya. Clifford Geertz, boleh disebut sebagai salah seorang generasi baru dan pembaharu metode etnografi. Geertz secara meyakinkan memperkenalkan metode antropologi interpretatif di dalam karya-karya etnografisnya. Istilah “teknis” metodologis yang juga sering diperbincangkan oleh Geertz yakni metode etnografi mikroskopis.

Sebetulnya dalam mengembangkan model riset etnografi mikroskopis ini, Geertz tidak bertolak dari sebuah “ruang” hampa. Geertz cukup teliti membaca karya-karya sosiolog Max Weber mengenai metode *verstehen*. Selanjutnya, konsep penting mengenai *thick description* (lukisan mendalam) dibedakan dari *thin description* (lukisan dangkal) diadaptasi oleh Clifford Geertz dari filsuf aliran bahasa biasa Gilbert Ryle. Menurut Geertz, ada tiga ciri penting paparan etnografis yaitu: lukisan harus bersifat interpretatif, (aliran perbincangan sosial) menyelamatkan aliran perbincangan sosial itu dalam kategori-kategori yang bisa dipahami oleh orang lain, dan paparan harus bersifat mikroskopis.

Secara umum metode *thick description* ini dipraktekkan oleh Geertz sendiri dalam riset-risetnya mengenai budaya masyarakat Bali (Kleden, 2006:170). Melalui salah satu studinya yang mengangkat topik perjudian sabung ayam di Bali (*the Balinese cockfight*), Geertz berhasil menunjukkan bahwa fenomena budaya perjudian di Bali menyimpan makna simbolis yang bersifat mikroskopis itu. Menurut Geertz, ayam (jantan) merupakan simbol *phallus* dan dari simbol kejantanan inilah kemudian mengungkapkan secara *clear* model kekuasaan yang tersembunyi. Geertz kemudian secara intens memanfaatkan metode etnografi mikroskopis ini untuk mengembangkan karya-karya etnografisnya. Jika dilacak akar historisnya, dapat dinyatakan bahwa konsep Geertz mengenai *thick description*, secara epistemologi-metodologis, sangat dekat dengan model pelukisan imajinatif di dalam bidang ilmu kesusasteraan.

Biografi Imajinatif: Berkaca dari Metode Sastra

Refleksi paling penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan merekomendasikan bahwa sesungguhnya bahwa epistemologi positivisme telah bermetamorfosa menjadi ideologi baru yang berwatak sangat totaliter. Betapa tidak hadirnya revolusi *science* dewasa ini justru secara perlahan menggerogoti sendi-sendi dasar nilai kemanusiaan. Eksistensi manusia di dalam bangunan logika *science*, tidak lebih dipandang sebagai obyek atau benda mati semata. Moment reduksi terhadap nilai kemanusiaan ini secara sederhana disebut dengan konsep dekadensi nilai-nilai humanitas.

Kecenderungan ilmu-ilmu sosial yang berpijak pada logika positivisme sesungguhnya hanya mampu “berangan-angan” menciptakan *grand theory* yang diandaikan berlaku secara universal. Cukup banyak ilmuwan sosial moderen mengajukan kritiknya bahwa “cita-cita” ilmu-ilmu sosial itu ternyata menemukan jalan buntu. Kegagalan ilmu-ilmu sosial dalam merespon dilema kemanusiaan itu, sebenarnya terletak pada keterbatasan perangkat metodologis-epistemologis yang samabelum menyentuh pengalaman historis-biografis individu. Dengan demikian “logika” sastra merupakan pilihan yang paling mungkin di tengah krisis yang menimpa ilmu-ilmu sosial.

Pilihan ilmu-ilmu social positivis untuk “berkolaborasi” dengan metode sastra didasari oleh pertimbangan bahwa secara teknis, sastra memiliki perangkat metodologis yang memadai dalam menjelaskan “narasi” hidup komunitas sosial. Dengan demikian, ilmu-ilmu sosialpositivis tidak perlu lagi berkutat dengan pertanyaan bagaimana *order* (tatanan) itu mungkin; melainkan sudah mulai melangkah lebih jauh yakni belajar untuk menata kembali tatanan-tatanan itu dalam sebuah “formasi” teks biografi sosial yang utuh. Terobosan baru dalam ilmu-ilmu sosial ini niscaya akan menghasilkan suatu pengetahuan sosio-kultural yang benar-benar inspiratif.

Isu semangat intradisipliner yang bergerak masuk ke dalam “tubuh” ilmu sosial memang akan mengundang polemik. Cukup banyak pemikir dalam bidang ilmu sosial positivis barangkali menjadi berang ketika beberapa rekannya “meminjam” terminologi sastra untuk menjelaskan fakta sosial yang ada. Betapapun demikian di tengah zaman yang semakin kompleks ini, sikap arogansi-intelektual sebaiknya sudah mulai ditinggalkan. Sebab asumsi-asumsi maupun riset-riset yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial “murni” positivis cenderung kering, abstrak, kurang imajinatif, bahkan terkesan jauh dari kondisi kontekstual yang dihadapi oleh manusia. Peran ilmu-ilmu sosial menjadi semakin teknis bahkan menciptakan jarak bagi subyek kajiannya sendiri (Budiarti, 2012:239). Alasan-alasan seperti inilah yang kemudian mendorong sosiolog Anthony Giddens, beralih memasuki “mata” sastra untuk mengembangkan teori-teori sosialnya.

Pengalaman akan keterasingan manusia hanya dialami oleh subyek atau individu yang menempati ruang sejarah tertentu. Berbeda dengan benda mati yang sama sekali tidak mengalami sebuah pengalaman (hidup) historisitas. Meskipun mengalami dilema eksistensial keterasingan, namun subyek (manusia) sebagai pelaku sejarah tidak pernah mengambil jarak atas situasi alienasi tersebut. Jadi dengan perangkat akalbudinya, manusia selalu berupaya mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pola artikulatifnya. Salah satu cara subyek agar bisa *survive* di tengah problem de-humanisasi itu melalui penciptaan teks narasinya yang bercorak parsial spesifik.

Sementara itu, dari referensi ilmu susastra, penciptaan teks biografis-historis ini lebih dikenal dengan istilah *stories telling* atau pengisahan pengalaman (tertentu). Apabila direfleksikan lebih jauh, dapat ditafsirkan bahwa konsep *storistelling* ini sebetulnya bukan merupakan konsep aneh atau baru sama sekali bagi sistem pengetahuan lokal. Lihatlah eksistensi para tetua adat dalam sistem budaya lokal dimana-pun. Para tetua adat ini selalu mempresentasikan apa yang dikatakan oleh teoritis sastra sebagai *stories telling* ini; lebih-lebih di saat ada ritual-ritual adat. Uniknyanya bahwa para tetua adat itu memiliki referensi aforisme filosofi hidup yang sarat makna. Melalui acara adat-lah filosofi hidup ini dinarasikan (ke)-pada generasi-generasi berikutnya.

Barangkali kita boleh bersepakat bahwa narasi atau kisah yang diceritakan oleh para tetua adat ini, memiliki makna yang sangat mendasar. Apabila ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat ditemukan pula bahwa ternyata budaya oral (sastra lisan) yang dimiliki tersebut mengandung makna yang sangat kaya dan benar-benar inspiratif. Meskipun demikian, ada satu hal yang paling mengagumkan dari dunia sastra lisan di dalam budaya lokal yakni kejeniusan para leluhur kita. Sistem keyakinan komunitas yang kaya makna itu, dinarasikan dalam bentuk metafora-metafora. Pola narasi yang bersifat metaforis inilah

letak konteks kejeniusan para leluhur kita yang perlu diappropriasi oleh para ilmuwan sosial.

Dengan demikian sastra yang selama ini kurang menarik minat orang sebab dianggap sebagai ilmu “*second class*” mendapatkan perannya sebagai “institusi” instrumental dalam mengantisipasi persoalan kemanusiaan. Pilihan ilmu sosial untuk “berkolaborasi” dengan metode sastra tentunya memiliki alasan sebab sastra memungkinkan subyek untuk berpikir kreatif, bebas dan berhasil memasuki dimensi kehidupan manusia secara mendalam (Haryatmoko, 2012:364); (Pohan, 2019:12). Sebaliknya, ilmu-ilmu sosial positivis tidak memiliki perangkat metodologi yang mumpuni untuk memasuki “narasi” hidup kelompok sosial yang dimarjinalkan. Dengan demikian, persoalan ilmu sosial tentang *order* atau (*problem of ordering*) dapat dijelaskan sebab di dalam epistemologi sastra (narasi) memungkinkan ilmu sosial untuk terbuka terhadap persoalan *order*. Konkritnya, ilmu-ilmu sosial moderen, tidak perlu lagi berkonsentrasi pada upaya pencarian hukum-hukum sosial yang berlaku secara universal.

Pada tataran ini, ilmu sosial melalui “kaca mata” sastra menjadi *clear* dan terbuka pada aspek landasan epistemologisnya sehingga tidak hanya menjadi penghuni “abadi” istana menara gadingnya, melainkan ikut terlibat didalam pergulatan pengalaman riil hidup manusia (Putra, (2009). Dengan metode sastra yang imajinatif kehidupan sosial dan budaya orang-orang kecil dapat *discover* oleh ilmu-ilmu sosial karena sekian abad ilmu sosial tidak mampu menjangkau kekhasan kelompok masyarakat kecil dan hanya sibuk dengan paradigma-paradigma teoritis yang *scoupy* lebih besar dan luas.

4. KESIMPULAN

Secara historis, sejak awal kehadirannya ilmu-ilmu sosial positivis justru menyibukkan diri menemukan hukum-hukum *order*, menciptakan kategori atau tipologi *order* dan berusaha mendesain *grand naration* mengenai sistem, pranata, dan persoalan *order* itu sendiri. Hasrat intelektual untuk menemukan “hukum-hukum” sosial yang bersifat makro tersebut telah memosisikan ilmu sosial positivis sebagai sistem pengetahuan yang kurang peka terhadap dimensi historisitas manusia. Padahal secara partikular, pengalaman akan ketertindasan sistemik hanya dialami oleh subyek yang menempati ruang sejarah tertentu. Meskipun demikian, subyek selalu menciptakan teks narasinya tersendiri. Persis di titik inilah letak kelemahan ilmu sosial positivis yang tidak mampu masuk ke dalam aspek narasi pribadi subyek karena disibukkan dengan premis-premis dasar yang cakupan kajiannya bercorak makro.

Bertolak dari fakta pengambilan jarak yang cukup kontras antara ilmu sosial positivis dengan subyek kajiannya sendiri, maka adopsi metodologis

menjadi keniscayaan yang mencerdaskan. Kolaborasi metodologis antara ilmu-ilmu sosial positif, antropologi dan ilmu sastra niscaya menghasilkan pengetahuan yang sifatnya lebih luas, kreatif, dan imajinatif. Lebih dari itu, adopsi epistemologi-metodologis yang terjadi, memungkinkan pendewasaan ilmu-ilmu sosial dari sisi perspektifnya. Pada tataran inilah dapat diinterpretasikan bahwa peran metode antropologi mikroskopis dan metode lukisan imajinatif susastra bagi perkembangan ilmu sosial menjadi sangat urgen. Meminjam terinspirasi Seno Gumira Ajidarma "ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara" (Ajidarma, (1997). Boleh ditafsirkan secara bebas bahwa ketika ilmu sosial tidak mampu berbicara tuntas tentang problem sosial kemanusiaan, "pintu" masuk ilmu antropologi dan sastra terbuka lebar dan bersedia dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyuarakan budaya orang-orang kecil yang dibungkam oleh sistem pengetahuan yang berwatak totaliter. Sungguh diharapkan munculnya spirit ilmu sosial-humaniora baru yang lebih imajinatif dan terutama manusiawi.

5. REFERENSI

- Ajidarma, S. G. (1997). *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Benteng Budaya, Yogyakarta
- Azis, I. S. (2003). "Karl Raimund Popper dan Auguste Comte (Suatu Tinjauan Tematik Problem Epistemologi dan Metodologi)". *Jurnal Filsafat*, Volume 35, Nomor 3. Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Bertens, K. (2002). *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Gramedia. Jakarta
- Budiyartati, S. (2012). "Indigenisasi Ilmu Sosial Sebagai Dasar Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Perspektif Filosofis". *Jurnal Socia*, Volume 11, Nomor 2. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNY Bekerjasama dengan HISPISI, Yogyakarta
- Comte, A. (1971). "The Positive Philosophy". Dalam Thompson, & J. Tunstall, *Sociological Perspectives*. Penguin Books. Harmondsworth
- Fachruliansyah, I. (2018). "Antropologi Biologi di Indonesia: Sebuah Penelusuran dan Kemungkinan, Pengembangan". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 39, Nomor 2. Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. (F. B. Hardiman, Penerj.) Kanisius. Yogyakarta
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Kanisius. Yogyakarta
- Haryatmoko. (2012). "Ilmu Budaya dan Metodologinya Bagaimana Ilmu Budaya Menghadapi Perubahan Episteme?" *Jurnal Adabiyat*, Volume XI, Nomor 2. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Kleden, Ignas. (2018). "Ilmu-Ilmu Sosial dan Teologi Kontekstual". *Jurnal Ledalero*, Volume 17 Nomor 2. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere
- Kleden, Ninuk. P. (2006). "Metode Pemahaman bagi Penelitian Antropologi". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 30, Nomor 2. Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Pinem, M. L. (2020). "Kritik Terhadap Epistemologi Barat". *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 3, Nomor 3. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
- Pohan, J.E. (2019). "Menyibak Sastra Feminisme Kekinian: Suatu Kajian Kritik Sastra Hermeneutik". *Kontras*, Volume 2, Nomor 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan
- Priyono, B. H. (2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Gramedia. Jakarta
- Putra, H. S. (2009). "Bahasa, Sastra, dan Kearifan Lokal di Indonesia". *Jurnal Mabasana*, Volume 3 Nomor 1.
- Kantor Bahasa NTB, Nusa Tenggara Barat
- Skoldberg, M. A. (2000). *Reflexive Methodology New Vistas for Qualitative Research*. Sage Publication. London
- Sukardi. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Suseno, F. M. (1999). *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia. Jakarta
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta